

ABSTRAK

Tesis ini membahas penerapan konsep penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi sebagai pelaku. Fokus utama terletak pada analisis bagaimana unsur penyalahgunaan wewenang, yang berasal dari ranah hukum administrasi, dapat diterapkan dalam hukum pidana khususnya dalam perkara korupsi korporasi. Permasalahan timbul karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi eksplisit mengenai penyalahgunaan wewenang. Hal ini menimbulkan berbagai interpretasi dalam putusan pengadilan, khususnya ketika subjek hukum bukanlah pejabat negara, melainkan korporasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil analisis terhadap beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan penerapan unsur penyalahgunaan wewenang, terutama dalam menilai kedudukan hukum korporasi. Dalam praktik, terjadi pergeseran makna penyalahgunaan wewenang dari hukum administrasi ke hukum pidana, tanpa kejelasan parameter yang konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan agar konsep penyalahgunaan wewenang dapat diterapkan secara adil dan konsisten dalam perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi, Korporasi, Hukum Administrasi, Hukum Pidana.

ABSTRACT

This thesis examines the application of the concept of abuse of authority in criminal acts of corruption involving corporations as perpetrators. The central focus lies in analyzing how the element of abuse of authority—originally rooted in administrative law—can be applied in criminal law, particularly in corporate corruption cases. The issue arises due to the lack of an explicit definition of "abuse of authority" in Article 3 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, leading to varied interpretations in court decisions, especially when the legal subject is a corporation rather than a public official.

This research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches. The analysis of several court rulings reveals inconsistencies in applying the element of abuse of authority, particularly in assessing the legal standing of corporations. In practice, there has been a shift in the meaning of abuse of authority from administrative law into criminal law without clear and consistent parameters. This study recommends the harmonization of laws and regulations to ensure fair and consistent application of the concept of abuse of authority in corporate corruption cases.

Keywords: Abuse of Authority, Corruption, Corporation, Administrative Law, Criminal Law.